

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Gender

Istilah gender diketengahkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat kodrat sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan tuntutan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan. Perbedaan itu sangat penting, karena selama ini sering kali mencampur-adukkan cirri-ciri manusia yang bersifat kodrat dan tidak berubah dengan ciri-ciri manusia yang bersifat gender yang sebenarnya bisa berubah.

Pembedaan peran gender ini sangat membantu untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada perempuan dan laki- laki. Perbedaan gender dikenal sebagai sesuatu yang tidak tetap, tidak permanen, memudahkan untuk membangun gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki-laki yang dinamis yang lebih tepat dan cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki- laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktifitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender itu melekat pada cara pandang masyarakat, sehingga masyarakat sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri-ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Secara sederhana perbedaan gender telah melahirkan pembedaan peran.

Anggapan bahwa sikap perempuan feminim dan laki-laki maskulin bukanlah sesuatu yang mutlak, semutlak kepemilikan manusia atas jenis kelamin biologisnya. Dengan demikian gender adalah perbedaan peran laki – laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksi oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk memahami konsep gender, harus dibedakan antara kata gender dengan kata sex.

Sex adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis, yang secara fisik melekat pada masing – masing jenis kelamin, laki – laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan, sehingga sifatnya permanen dan universal.

Di lain pihak, alat analisis sosial yang telah ada seperti analisis kelas, analisis diskursus (*discourse analysis*) dan analisis kebudayaan yang selama ini digunakan untuk memahami realitas sosial tidak dapat menangkap realitas adanya relasi kekuasaan yang didasarkan pada relasi gender dan sangat berpotensi menumbuhkan penindasan. Jelaslah analisis gender sebenarnya menggenapi sekaligus mengoreksi alat analisis sosial yang ada yang dapat digunakan untuk meneropong realitas relasi sosial lelaki dan perempuan serta akibat yang ditimbulkannya.

2.2 Penerapan Sistem Patriarki pada Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui bersama di dunia Barat ataupun di Timur, perkembangan peradaban manusia tumbuh dalam lingkup budaya dan ideologi patriarki. Di negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, budaya dan ideologi tersebut masih sangat kental dan mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat serta menciptakan ketimpangan-ketimpangan gender.

Budaya dan ideologi di bentuk oleh manusia dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam budaya Indonesia, seperti juga di banyak negara dunia ketiga lain, budaya patriarki masih sangat kental. Dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam budaya, keadaan ketimpangan, asimetris dan subordinatif terhadap perempuan tampak sangat jelas. Dalam kondisi yang seperti itu proses marjinalisasi terhadap perempuan terjadi pada gilirannya perempuan kehilangan otonomi atas dirinya. Eksploitasi serta kekerasan terjadi terhadap perempuan, baik di wilayah domestik maupun publik.

Bagi masyarakat tradisional patriarki dipandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal tersebut selalu dikaitkan dengan kodrat dan kekuasaan adikodrat yang tidak terbantahkan. Kepercayaan bahwa Tuhan telah menetapkan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan, sehingga perbedaan dalam kehidupan manusia pun diatur berdasarkan perbedaan tersebut. Tambah lagi, faktor agama telah digunakan untuk memperkuat kedudukan kaum laki-laki. Determinis biologis juga telah memperkuat pandangan tersebut. Artinya, karena secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda maka fungsi-fungsi sosial ataupun kerja dengan masyarakat pun di ciptakan berbeda. Laki-laki selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas di luar rumah, sedangkan perempuan yang berkodrat melahirkan ada di dalam rumah, mengerjakan urusan domestik saja. Perempuan bertugas pokok membesarkan anak, laki-laki bertugas mencari nafkah. Perbedaan tersebut di pandang sebagai hal yang alamiah. Itu sebabnya ketimpangan yang melahirkan subordinasi perempuan pun dipandang sebagai hal yang alamiah pula. Hal tersebut bukan saja terjadi dalam keluarga, tetapi telah melebar ke dalam kehidupan masyarakat.

2.3 Ketimpangan Gender didalam Masyarakat Patriarki

Sesungguhnya perbedaan gender (gender differences) tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun persoalannya adalah tidak sesederhana yang difikirkan, ternyata perbedaan gender tersebut melahirkan berbagai ketidakadilan. Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur dimana kaum lelaki dan perempuan menjadi korban dari sistem itu.

Aplikasi gender di masyarakat belum sesuai dengan yang diharapkan, karena masih sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya setempat. Ketimpangan gender melahirkan ketidakadilan (gender inequalities). Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, misalnya: subordinasi, marginalisasi, beban kerja lebih banyak, stereotip dan lain-lain. Manfaat dan dampak dari aspek terhadap kualitas lelaki dan perempuan sebagai sumber daya pembangunan, bahwa pola sosialisasi yang berbeda antar laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan kesenjangan gender. Bentuk-bentuk yang dapat diamati munculnya gejala-gejala ketertinggalan, subordinasi, marginalisasi dan diskriminasi.

Perbedaan gender dalam beberapa hal akan menghantarkan kita pada ketidakadilan gender (gender inequalities). Ketidakadilan yang dilahirkan perbedaan gender inilah yang sesungguhnya sedang dipertanyakan. Ternyata dari sejarah perkembangan hubungan yang tidak adil, menindas serta mendominasi antara kedua jenis kelamin tersebut. Bentuk manifestasi ketidakadilan gender ini adalah dalam mempersepsikan, memberi nilai serta pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hukum waris pengaruh adat dan agama tidak dapat diabaikan. Salah satu aturan gender dalam adat dapat kita lihat dalam soal pewarisan di tiga bentuk system masyarakat adat, yakni patrilineal, matrilineal dan bilateral. Dalam masyarakat patrilineal, seperti diwakili pakpak anak laki-laki akan tetap menuntut rumah keluarga sebagai bagian warisan. Sekalipun dalam kenyataannya saudara perempuanlah yang mengurus rumah, bahkan ikut bekerja keras membantu orang tua guna menghidupi saudara lakilakinya, termasuk membiayai sekolah/perantauannya sedangkan dalam masyarakat matrilineal, yang diwakili oleh suku Minangkabau, warisan "pusaka tinggi" diwariskan kepada anggota keluarga menurut garis ibu. Sekalipun demikian mamaklah (paman laki-laki) yang memiliki kekuasaan pengaturannya. Seringkali mamak juga ikut mengambil bagian dari warisan tersebut, dan bahkan menguasainya. Patriarki telah melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bidang.

2.3.1 Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Berbagai pembedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki baik secara langsung yang berupa perlakuan maupun sikap dan yang tidak langsung berupa dampak suatu peraturan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidak-adilan yang berakar dalam sejarah, adat, norma, ataupun dalam berbagai struktur yang ada dalam masyarakat.

Ketidak-adilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang sosialisasikan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk.

Bentuk – bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi itu meliputi :

1. Gender dan marginalisasi perempuan

Bentuk manifestasi ketidakadilan gender adalah proses marginalisasi atau pemiskinan terhadap kaum perempuan. Hal-hal yang membuat kaum perempuan termarginalkan seperti kebijakan pemerintah, keyakinan tradisi, tafsiran agama, kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

2. Gender dan subordinasi perempuan

Subordinasi adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Ada pandangan kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Misalkan saja apabila suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri sedangkan istri yang hendak tugas belajar harus seizin suami.

3. Gender dan stereotip

Stereotip merupakan pelabelan atau penandaan yang sering kali bersifat negatif, secara umum selalu melahirkan ketidakadilan pada salah satu jenis kelamin tertentu. Contohnya perempuan yang diidentikkan lembut, lemah emosional identik dengan pekerjaan pekerjaan rumah, maka peluang untuk bekerja diluar sangat terbatas bahkan ada juga perempuan yang memiliki pendidikan tidak pernah menerapkan pendidikannya untuk mengaktualisasikan diri.

4. Gender dan kekerasan

Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan yang bersumber anggapan gender "gender-related violence", yang pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan. Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi karena budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Kekerasan digunakan laki-laki untuk memenangkan pendapat dan menyatakan rasa tidak puas, dan seringkali hanya untuk menunjukkan bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan. Pada dasarnya kekerasan yang berbasis gender adalah refleksi dari sistem patriarki yang berkembang dimasyarakat.

5. Gender dan beban ganda

Beban kerja (*double burden*) yaitu suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender dimana beberapa beban kegiatan diemban lebih banyak oleh salah satu jenis kelamin. Dengan berkembangnya wawasan kemitraan berdasarkan pendekatan gender. Maka perkembangan perempuan mengalami perkembangan yang cukup cepat, namun perlu di cermati bahwa perkembangan perempuan tidaklah "mengubah" peranan yang "lama" yaitu peranan dalam lingkup rumah tangga. Maka perkembangan peranan perempuan ini sifatnya menambah atau beban kerja terkesan berlebihan. Bagi golongan kelas kaya beban kerja ini dilimpahkan pada pembantu rumah tangga (*domestic workers*) mereka ini juga termasuk korban dari bias gender.

2.4 Teori Struktural Fungsional

Teori atau pendekatan struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling memengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat.

Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat (Ratna Megawangi, 1999: 56).

Menurut para penganutnya, teori struktural-fungsional tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Talcott Parsons dan Bales menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah suatu yang wajar (Nasaruddin Umar, 1999: 53). Dengan pembagian kerja yang seimbang, hubungan suami-isteri bisa berjalan dengan baik. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih antar fungsi, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Keseimbangan akan terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula.

Struktur sosial terdiri dari berbagai komponen dari masyarakat, seperti kelompok-kelompok, keluarga-keluarga, masyarakat setempat/lokal dan

sebagainya. Kunci untuk memahami konsep struktur adalah konsep status (posisi yang ditentukan secara sosial, yang diperoleh baik karena kelahiran (*ascribed status* maupun karena usaha (*achieved status*) seseorang dalam masyarakat). Setiap status memiliki aspek dinamis yang disebut dengan peran (*role*) tertentu, misalnya seorang yang berstatus ayah memiliki peran yang berbeda dengan seseorang yang berstatus anak

Kedudukan seseorang dalam keluarga akan menentukan fungsinya, yang masing-masing berbeda. Namun perbedaan fungsi ini tidak untuk memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan, tetapi untuk mencapai tujuan organisasi sebagai kesatuan. Tentunya, struktur dan fungsi ini tidak akan pernah lepas dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat itu (Megawangi, 2001)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Parsons dengan Bales, mereka membuat kesimpulan bahwa institusi keluarga serta kelompok-kelompok kecil lainnya, dibedakan (didiferensiasikan) oleh kekuasaan atau dimensi hierarkis. Umur dan jenis kelamin biasanya dijadikan dasar alami dari proses diferensiasi ini. Parsons menekankan pula pentingnya diferensiasi peran dalam kesatuan peran instrumental-ekspresif. Dalam keluarga harus ada alokasi kewajiban tugas yang harus dilakukan agar keluarga sebagai sistem dapat tetap ada .

Struktural-fungsional berpegang bahwa sebuah struktur keluarga membentuk kemampuannya untuk berfungsi secara efektif, dan bahwa sebuah keluarga inti tersusun dari seorang laki-laki pencari nafkah dan wanita ibu rumah

tangga adalah yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan anggota dan ekonomi industri baru.

Struktur sosial sebagai hubungan antara entitas yang berbeda atau pola-pola hubungan relatif yang penekanannya pada ide bahwa masyarakat adalah kelompok yang termasuk ke dalam struktur hubungan kelompok yang telah disetting oleh aturan-aturan dengan membedakan fungsi-fungsinya, makna serta tujuan. Sebagai contoh struktur sosial misalnya ide tentang tingkatan sosial (*social stratification*), yang mana idenya adalah membedakan masyarakat ke dalam strata-strata, termasuk ras, kelas, dan gender. *Social treatment* dari masing-masing individu dengan berbagai macam struktur sosial akan dapat dimengerti jika dihubungkan dengan menempatkan individu-individu atau kelompok ke dalam tingkatan (strata) sosial.

Masyarakat yang berfungsi adalah masyarakat yang stabil, harmoni dan sempurna dari segala segi termasuk dari segi kerjasama, persatuan, hormat menghormati dan sebagainya. Singkatnya masyarakat fungsional ialah masyarakat yang mempunyai sikap positif. Kehidupan masyarakat fungsional senantiasa seimbang dan disenangi oleh yang lain. Mereka mudah gaul antara satu sama lain. Sebaliknya masyarakat tidak fungsional ialah masyarakat yang tidak berfungsi. Masyarakat tidak berfungsi merujuk kepada masyarakat yang senantiasa mempunyai masalah seperti tidak puas terhadap pemerintah, kacau balau, tidak menunjukkan sikap tidak kerjasama dan selalu porak peranda, Mereka mempunyai sikap individualistik, Masyarakat juga tidak menghormati orang tua maupun yang muda dan tidak memiliki nilai-nilai moral yang baik, Mereka senantiasa bersikap negatif sepanjang kehidupan di alam semesta.

Teori yang dikembangkan oleh Parsons (1964), dan Parsons dan Bales (1956) adalah teori yang paling dominan sampai akhir tahun 1960-an dalam menganalisis institusi keluarga. Penerapan teori struktural-fungsional pada keluarga oleh Parsons adalah sebagai reaksi dari pemikiran-pemikiran tentang meluntumnya atau berkurangnya fungsi keluarga karena adanya modernisasi. Bahkan menurut Parsons, fungsi keluarga pada zaman modern, terutama dalam hal sosialisasi anak dan *tension management* untuk masing-masing anggota keluarga, justru akan semakin terasa penting.

Keluarga dapat dilihat sebagai salah satu dari berbagai subsistem dalam masyarakat. Keluarga dalam subsistem masyarakat juga tidak akan terancam dari interaksinya dengan subsistem-subsistem lainnya yang ada dalam masyarakat, misalnya sistem ekonomipendidikan dan agama. Dengan interaksinya dengan subsistem-subsistem tersebut, keluarga berfungsi untuk memelihara keseimbangan.

2.5 Nilai Ganda

Nilai ganda menunjuk kepada ukuran yang dikenakan secara tidak sama kepada semua orang, dan karena itu dianggap tidak adil. Ketika menyangkut pada nilai atau hal menguntungkan bagi laki-laki maka hal tersebut adalah milik laki-laki. Dan apabila mengarah pada tanggung jawab adalah milik perempuan. Contohnya di pada pembagian kerja di beberapa daerah sebagai laki-laki seorang bagaikan 'raja' sehingga 'enggan' melakukan pekerjaan domestik, seperti mencuci, memasak dan mengasuh anak.

Sama sekali tidak ada celah untuk berbagai peran antara laki-laki dengan perempuan dalam relasi sebagai anak laki-laki dan anak perempuan di ranah

domestik. Ini terjadi karena pemahaman yang hanya berdasarkan sudut pandang (memandang sesuatu berdasarkan prasangka) laki-laki sebagai 'pemimpin'. Perempuan memiliki tanggung jawab mencari nafkah dan mengurus rumah tangga. Sedangkan dalam pembagian harta warisan anak laki-lakilah yang mendapatkan lebih banyak. Nilai dapat berubah dan selalu mementingkan kepentingan laki-laki karena budaya patriakat.

Contoh lain dalam pembagian warisan anak laki-laki mendapatkan hak yang lebih banyak dari anak perempuan akan tetapi menyangkut kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga (pencari nafkah), mengurus keluarga adalah tanggung jawab dari anak perempuan.